



Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Analisis Perubahan dan Tantangan

Andi Alifah Nurul Fathiyah¹, A'aisyah Ar Rojwah², Qoriina³, Syarifah Noviyani⁴,
Riky Supratama⁵

^{1,2,3,4,5}Manajemen Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia

alifahnurul22@stitmadani.ac.id

ABSTRACT

Keywords :

Islamic Religious Education;
Curriculum;
Changes;
Challenges.

Abstract: *The transformation of the Islamic Education curriculum in Indonesia has been ongoing since the country's independence and continues to evolve in line with social and political dynamics, as well as advances in science and technology. This study aims to analyze the transformation of the Islamic Education curriculum in Indonesia from the 1947 curriculum to the Merdeka curriculum, with a focus on identifying changes in educational approaches and challenges in the implementation process. This study employs a descriptive qualitative approach through literature review and analysis of official documents. The findings trace the dynamics of the paradigm shift in Islamic Religious Education, from an approach based on character and religiosity toward a contextual approach that is adaptive to digital technology and the needs of the times. The results of the study indicate that each curriculum change brings a diverse spirit of renewal. However, each phase of change faces implementation challenges, such as disparities in teacher resources, a lack of contextual pedagogical training, and infrastructure limitations, especially in remote areas. Therefore, this study recommends the need to enhance teacher competencies through continuous training, strengthen regulations for the implementation of adaptive curricula, and foster collaboration among education stakeholders to ensure the success of the Islamic Religious Education curriculum in shaping students' characters to be religious, inclusive, and responsive to the challenges of the times.*

Kata Kunci :

Pendidikan Agama Islam;
Kurikulum;
Perubahan;
Tantangan.

Abstrak: Transformasi Kurikulum PAI di Indonesia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, serta kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka, dengan fokus pada identifikasi perubahan pendekatan pendidikan serta tantangan dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi. Temuan menelusuri dinamika pergeseran paradigma Pendidikan Agama Islam, dari pendekatan berbasis karakter dan religiusitas menuju pendekatan kontekstual yang adaptif terhadap teknologi digital dan kebutuhan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di setiap perubahan kurikulum membawa semangat pembaruan yang beragam. Namun, setiap fase perubahan dihadapkan pada tantangan implementasi, seperti ketimpangan pada sumber daya guru, minimnya pelatihan pedagogik kontekstual, serta keterbatasan infrastruktur terutama di daerah tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan regulasi implementasi kurikulum yang adaptif, serta sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan, guna memastikan keberhasilan kurikulum PAI dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, inklusif, dan responsif dengan tantangan zaman.

Article History:

Received : 20-07-2025
Revised : 25-07-2025
Accepted : 05-08-2025
Online : 08-09-2025



<https://doi.org/10.31764/pendekar.v8i3.33254>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



A. LATAR BELAKANG

Kurikulum berasal dari kata *curir* atau *curere*, yang digunakan pertama kali pada dunia olahraga zaman Yunani kuno, untuk menempuh jarak seorang pelari. Kurikulum merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang berfungsi sebagai acuan dalam merancang proses pembelajaran serta pengembangan peserta didik secara menyeluruh (Dhomiri et al., 2023). Kurikulum berisi seperangkat materi ajar dan rancangan terstruktur yang mencakup kompetensi, nilai, dan pendekatan pembelajaran yang di sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial. Dalam konteks pendidikan nasional, kurikulum tidak hanya menjadi alat teknis pembelajaran, namun juga mencerminkan arah kebijakan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum harus senantiasa mengalami penyesuaian agar tetap relevan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial, politik, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan orientasi kebijakan pendidikan nasional (Sholihah et al., 2018).

Di Indonesia, sejak kemerdekaan hingga era kurikulum Merdeka, tercatat telah terjadi 12 kali perubahan pada kurikulum, dimulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini (Trisnawati et al., 2020). Pada perubahannya tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, perubahan paradigma pendidikan, serta tantangan dalam membangun karakter peserta didik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu mata pelajaran yang mengalami dampak signifikan dari perubahan kurikulum tersebut adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, PAI memiliki peran strategis yang tidak hanya mencetak peserta didik yang berilmu, tetapi juga membentuk karakter berakhlak baik, spiritualitas, dan moral, khususnya ada pada masyarakat mayoritas Muslim (Buairi, 2025).

Transformasi kurikulum PAI yang terjadi dari masa ke masa menunjukkan pergeseran paradigma yang cukup kompleks. Pada kurikulum awal seperti 1947 dan 1952, Pendidikan Agama Islam belum memiliki posisi strategis dan diajarkan secara terbatas, yang bergantung pada permintaan peserta didik dan ketersediaan guru. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam mencetak generasi berkarakter, PAI mulai mendapatkan pengakuan secara formal dan ditempatkan sebagai mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum nasional. Lalu, kurikulum berikutnya, seperti kurikulum 1975, 1994, hingga 2013 konsisten dalam menunjukkan upaya memperkuat pendekatan pembelajaran PAI, baik segi konten, strategi, pembelajaran, sampai pada sistem evaluasi (Ananda & Hudaidah, 2021).

Pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, mulai mengintegrasikan pendekatan saintifik, kontekstual, dan berbasis teknologi. Pendekatan tersebut menuntut guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam praktik belajar yang aktif, bermakna, dan kolaboratif. Dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi bagian penting dari pendekatan pembelajaran era kini (Zaelani et al., 2023). Namun demikian, perubahan pada kurikulum ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman dan keterampilan pedagogis guru dalam menerapkan pendekatan baru, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, keterbatasan sarana pembelajaran di berbagai daerah, serta ketimpangan pelaksanaan antar wilayah pusat dan pinggiran (Aminah & Sya'bani, 2023). Dan hal ini menjadi dampak belum optimalnya implementasi kurikulum dalam membentuk peserta didik yang seimbang, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial.

Maka dari itu, perubahan pada kurikulum tidak hanya pada tataran administrasi dan dokumen kebijakan, tetapi harus benar-benar harus dirancang agar kontekstual dengan kebutuhan lokal serta dapat diimplementasikan secara efektif oleh guru maupun satuan pendidikan. Terutama pada konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan mengalami transformasi sosial yang cepat, sehingga kurikulum PAI juga dituntut tidak hanya menanamkan pemahaman keagamaan, tetapi juga mendorong pada nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, perlu melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perubahan transformasi kurikulum PAI berlangsung dari waktu ke waktu, pendekatan apa saja yang digunakan dalam tiap kurikulum, serta tantangan utama apa saja yang muncul dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara historis dan kritis transformasi perubahan kurikulum PAI di Indonesia sejak kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka, dengan fokus pada bentuk perubahan pendekatan pembelajaran serta identifikasi tantangan implementatifnya. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman menyeluruh terhadap arah pengembangan kurikulum PAI di masa depan agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dinamika perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam secara historis dan konseptual dari masa ke masa. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi kurikulum nasional mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka, serta literatur akademik berupa jurnal ilmiah, artikel, buku, dan regulasi kebijakan pendidikan dari lembaga pemerintah, seperti kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta kementerian Agama.

Kriteria dalam pemilihan sumber didasarkan pada tingkat relevansi dengan topik kajian, kredibilitas penerbit, tahun publikasi, dan keterkaitan langsung dengan transformasi kurikulum PAI di Indonesia. Dengan penetapan ini, data yang digunakan diharapkan dapat mencerminkan kondisi empiris dan teoretis yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap sistematis yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Untuk menjamin validitas dan objektivitas data peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari dokumen kurikulum resmi, literatur ilmiah, serta laporan dan kebijakan pemerintah terkait implementasi kurikulum. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa data yang disajikan memiliki dukungan yang kuat dari berbagai perspektif. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam, serta teruji dan objektif mengenai transformasi kurikulum PAI di Indonesia dan tantangan implementasinya dari masa ke masa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perubahan paradigma pendidikan nasional, transformasi kurikulum PAI di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara dinamis. Untuk memahami proses transformasi secara utuh, kajian difokuskan pada analisis kurikulum PAI dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka. Setiap periode dipilih karena memiliki posisi strategis dalam lintasan sejarah pendidikan Indonesia, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PAI terus mengalami penyesuaian dari masa ke masa, baik dalam hal tujuan pendidikan, pendekatan pembelajaran, maupun interogasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan zaman.

Melalui kajian historis dan telaah dokumen kurikulum, ditemukan bahwa setiap kurikulum nasional memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam menempatkan pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan pergeseran kebijakan negara, namun juga memperlihatkan bagaimana PAI mampu beradaptasi terhadap konteks sosial politik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan hasil temuan berdasarkan masing-masing periode kurikulum nasional, mulai dari

kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka. Di setiap periode akan dibahas secara sistematis untuk melihat bagaimana posisi PAI berkembang, serta tantangan yang muncul dalam implementasinya.

1. Kurikulum 1947 (Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947)

Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang dirancang pasca kemerdekaan Indonesia, yang dikenal sebagai *Rentjana Pendidikan 1947* dari bahasa Belanda yang memakai istilah "*leer plan*". Kurikulum ini berorientasi politik dengan penyesuaian sistem pendidikan Belanda, terutama dalam hal struktur dan penyusunan mata pelajaran (Arisanti, 2022). Di tengah suasana revolusi dan transisi dari sistem pendidikan kolonial, pemerintah menyusun kurikulum ini untuk mengarahkan pendidikan yang lebih nasionalistik dengan menekankan karakter kebangsaan, moral, dan agama. Pembelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan kehidupan bermasyarakat daripada pendidikan akademik, yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan perhatian khusus pada seni dan pendidikan jasmani. Sedangkan untuk tingkat sekolah rakyat, terdapat 16 mata pelajaran, yang meliputi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, Ilmu alam, Ilmu hayat, Ilmu bumi, Ilmu sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan, dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan agama.

Garis besar pada kurikulum ini menekankan pada metode pengajaran guru dan cara belajar murid, evaluasi dalam proses pengembangan model kurikulum pada rencana pelajaran 1947 ini menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai dilaksanakan pada tahun 1950 (Raharjo, 2020). Pelaksanaan pada Kurikulum 1947 ini juga tidak menekankan pada aspek kognitif, tetapi hanya mengutamakan pada pendidikan karakter, membangun rasa nasionalisme, watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat dengan tujuan mencerminkan identitas dan kebutuhan bangsa Indonesia yang baru merdeka (Wibawanti, 2018). Sesuai dengan konteks 1947, kurikulum ini berfokus pada penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta terdada NKRI.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, kurikulum 1947 menjadi titik awal pengakuan formal terhadap eksistensi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Namun, implementasi PAI pada masa ini masih bersifat opsional, belum diwajibkan secara menyeluruh, artinya PAI hanya diterapkan pada sekolah-sekolah dengan mayoritas peserta didik Muslim, diajarkan ketika terdapat permintaan dari peserta didik, dan jika tersedia guru yang memenuhi syarat untuk mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa PAI belum memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional saat itu (Dhaifi, 2018).

Secara praktis, pembelajaran agama dilaksanakan dua jam pelajaran dalam seminggu dan tidak menjadi bagian dari mata pelajaran pokok, dengan begitu integrasi nilai-nilai agama belum menjadi fokus utama, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Pada dasarnya kurikulum Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum tradisional yang mengedepankan semangat kebangsaan di tengah keterbatasan sistem pendidikan nasional yang baru lahir (Ananda & Hudaidah, 2021, p. 104). Sehingga, Pendidikan Agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran tidak wajib, dalam pelaksanaannya masih sangat terbatas, tidak ada standar nasional yang mengatur materi, pendekatan pembelajaran, dan dalam penyusunannya masih bersifat sentralistik serta belum mempertimbangkan kebutuhan peserta didik Muslim secara menyeluruh.

2. Kurikulum 1952 (Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai)

Setelah Rencana Pelajaran 1942, kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan yang diperbarui dari kurikulum 1947, yang dikenal sebagai Kurikulum *Rencana Pelajaran Terurai 1952*. Kurikulum ini mulai menunjukkan orientasi yang lebih kuat pada nilai-nilai nasional dan religius, dan menjadi awal dari pengakuan lebih formal terhadap pelajaran agama dalam sistem pendidikan nasional dengan menampilkan lebih rinci untuk setiap mata pelajaran, bukan lagi bersifat opsional seperti kurikulum 1947 (Wahyuni, 2015). Salah satu pencapaian pentingnya adalah pemerintah mulai menyadari

pentingnya peran agama dalam membangun karakter, dan memperoleh pengakuan lebih tinggi secara institusional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya bentuk komitmen negara untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam sistem pendidikan formal (Dhaifi, 2018, p. 79).

Dalam kurikulum ini, mulai menetapkan Pendidikan Agama Islam sebagai bagian identitas pendidikan nasional. Di beberapa daerah, pelajaran agama mulai diwajibkan di sekolah-sekolah negeri yang mayoritas peserta didik Muslim dan dimasukkan dalam alokasi waktu pelajaran meskipun masih terbatas. Materi ajar PAI pun mulai disusun secara rinci mengenai isi dan capaian pembelajarannya. Karakteristik perubahan dalam kurikulum ini pun bisa dilihat bahwa PAI mengalami peningkatan status menjadi lebih terstruktur dan masuk dalam sistem pelaporan hasil belajar, pemerintah mulai lebih serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembentukan karakter peserta didik, dan mulai dikenal sebagai bagian dari pengelompokan bidang studi termasuk agama sebagai bagian dari kelompok moral.

Meskipun sudah mempertegas PAI dalam pendidikan nasional, akan tetapi dalam proses implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup belum merata dalam ketersediaan tenaga pendidik agama profesional yang memiliki kualifikasi memadai, keterbatasan bahan ajar dan sumber, dan minimnya pelatihan guru dalam memahami pendekatan pedagogis yang sesuai dengan perkembangan psikologis siswa (Nurfadillah, 2024, p. 12). Akibat kondisi tersebut, berdampak rendah pada capaian kurikulum, terutama dalam hal pendidikan moral dan spiritual yang seharusnya menjadi fokus utama. Sering kali perhatian pada aspek akhlak dan pembentukan karakter belum mendapatkan penekanan optimal dalam praktik pembelajaran sehari-hari (Zubaedi, 2017).

Meskipun demikian, kurikulum 1952 merupakan tonggak awal resmi ditematkannya PAI sebagai bagian penting dalam pendidikan nasional, walaupun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural. Relevansi kurikulum ini terhadap tujuan penelitian terletak pada proses penguatan posisi agama Islam dalam sistem pendidikan pasca kemerdekaan, yang kelak menjadi awal mulainya era baru dan dasar penting dalam arah pengembangan kurikulum PAI berikutnya.

3. Kurikulum 1964 dan kurikulum 1968

Menuju pada tahun 1964, disusun di penghujung era orde lama, dan diberi nama *Rencana Pendidikan 1964*. Fokus utama dari kurikulum ini adalah memberikan pengetahuan dasar yang seimbang kepada peserta didik terutama pada tingkat SD dengan pendekatan pembelajaran menyeluruh, yang menekankan pada pengembangan tiga ranah utama: kognitif, afektif, dan psikomotorik, melalui kegiatan kreatif, rasa, karya, dan moral (Izmi, 2017). Proses yang mewajibkan untuk setiap anak agar mampu dalam memikirkan pemecahan masalah sendiri yang dihadapi nanti di masyarakat atau dikenal *problem solving*. Konsep ini juga diperkuat dengan model humanis, yaitu dengan penanaman pendidikan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Dengan kombinasi tersebut, diharapkan membentuk peserta didik sebagai manusia yang Pancasila, sosialis, memiliki sikap nasionalisme, dan cinta tanah air yang tinggi. Perkembangan pada kurikulum 1964 ini, sudah dikatakan sempurna, karena pada pembelajaran sudah mencapai ketiga aspek penting untuk peserta didik, yang sifatnya saat itu sudah ada upaya lebih dalam pengembangan potensi (Fadhilah Putri & Maula, 2024).

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, kurikulum PAI dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat integrasi antara ajaran Islam dan ideologi negara. Pembelajaran pada kurikulum ini memberikan porsi yang lebih kuat dalam membentuk kepribadian yang religius, nilai-nilai moral, dan cinta tanah air. Meskipun belum sepenuhnya seragam secara nasional, kurikulum ini mengarahkan peserta didik untuk memahami ajaran agama Islam secara aplikatif, bukan hanya teoritis. Dalam masa implementasinya, kurikulum ini masih menghadapi beberapa tantangan yaitu, kekurangan pada kurikulum ini baru dapat digunakan pada tingkat SD, masih terbatasnya pelatihan

guru agama dalam pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran PAI terjebak pada hafalan bukan penghayatan, dan belum bisa melingkupi pada sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi (Respatiadi et al., 2022).

Lalu, perubahan pada situasi politik nasional setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965 membawa pergeseran besar dalam arah kebijakan pendidikan nasional (Izmi, 2017, p. 90). Pemerintahan Orde Baru mulai mengambil alih kekuasaan dan melakukan reformasi pendidikan sebagai bagian dari upaya depolitisasi dan stabilisasi nasional. Hal tersebut mendorong lahirnya Kurikulum 1968 yang menggantikan Kurikulum 1964 dengan menekankan stabilisasi politik dan deideologisasi pengaruh lama dan menguatkan narasi nasionalisme dan kesatuan bangsa. Dalam kurikulum ini, PAI menjadi dipertegas sebagai media pembinaan akhlak peserta didik, namun dalam pendekatannya menjadi normatif dan dogmatis, dalam upaya menjawab tuntutan stabilitas moral pasca ketegangan politik. Kurikulum 1968 juga memperkuat posisi PAI secara formal sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi seperti, penerapan yang masih seragam tanpa memperlihatkan konteks lokal dan keberagaman peserta didik, kurikulum masih dipengaruhi oleh faktor politik, dan kurang memberikan dalam pembelajaran praktik (Febriyenti et al., 2023). Meskipun begitu, kurikulum 1964 meninggalkan warisan penting, terutama dalam penguatan pendidikan karakter dan religius, penegasan bahwa pelajaran agama Islam wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan dari dasar hingga menengah. Langkah tersebut pun menjadi respons terhadap desakan tokoh-tokoh Islam atas kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama Islam sebelumnya. Pendidikan agama Islam yang bersifat informatif juga edukatif dan transformasional dengan tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, taat beragama dan berkepribadian Pancasila. Dengan demikian pun, kurikulum 1964 turut mengembalikan kedudukan agama sebagai fondasi moral bangsa dalam sistem pendidikan nasional.

4. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 lahir sebagai respons atas berbagai perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, terutama sejak dimulainya program Pembangunan Nasional atau Pelita I pada tahun 1969. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pendidikan nasional dituntut untuk menjadi lebih relevan, efisien, serta mampu menghadapi tantangan zaman. Kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 1968, dinilai tidak lagi memadai untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pada tahun 1975 disusunlah kurikulum baru yang lebih terarah, modern, dan terstruktur, guna menunjang strategi pembangunan bangsa secara menyeluruh. Yang mana memiliki tujuan untuk mengarahkan proses pendidikan secara sistematis dan terstruktur mulai dari tujuan pendidikan nasional, hingga tujuan instruksional khusus pada tingkat satuan pelajaran. Kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan, mengefisienkan penggunaan waktu dan tenaga, serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk pembaruan, Kurikulum 1975 memperkenalkan berbagai pendekatan baru dalam pembelajaran. Pertama, Pendekatan Tujuan yang menekankan pentingnya pencapaian pembelajaran yang jelas dan terukur. Kedua, Pendekatan Sistem yang memandang proses pembelajaran sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terkait antara input, proses, dan output. Ketiga, Pendekatan Integratif, yaitu dengan menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu rumpun, seperti Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), untuk tujuan efisiensi dan penyederhanaan. Terakhir, Pendekatan Ekosistem yang bertujuan mengakomodasi keberagaman kondisi belajar dan keterbatasan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.

Kurikulum 1975 juga memperkenalkan satuan pelajaran sebagai unit dasar dalam proses pengajaran. Satuan pelajaran ini merupakan program pembelajaran kecil yang disusun oleh guru untuk digunakan dalam kelas konvensional. Berbeda dengan modul yang bersifat mandiri dan

digunakan langsung oleh siswa, satuan pelajaran tetap menempatkan guru sebagai fasilitator utama. Inovasi lain yang signifikan adalah penerapan penilaian di setiap akhir satuan pelajaran. Penilaian ini bertujuan mendeteksi kesulitan belajar sejak dini dan memberi kesempatan kepada guru untuk merevisi pendekatan pembelajaran sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian dalam Kurikulum 1975 bersifat formatif dan lebih menekankan proses daripada sekadar hasil akhir (Febriyenti et al., 2023)

Adapun dampak besar yang terjadi dari Kurikulum 1975 terjadi pada mata pelajaran Sejarah. Dengan pendekatan integratif, Sejarah digabungkan ke dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bersama Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Langkah ini diadopsi dari praktik pendidikan Amerika Serikat (Social Studies), dan ditujukan untuk menyederhanakan kurikulum agar tidak membebani siswa. Namun, penggabungan ini berdampak negatif terhadap keberadaan pelajaran Sejarah. Sebelumnya, Sejarah adalah mata pelajaran mandiri yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa, jati diri nasional, dan semangat kebangsaan. Setelah tergabung dalam IPS, porsi waktu dan kedalaman pembahasan sejarah menjadi terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap pembentukan nasionalisme siswa pun berkurang. Banyak siswa tidak lagi menganggap sejarah sebagai pelajaran penting, karena hanya menjadi bagian kecil dalam rumpun IPS. Bahkan, Presiden Soeharto saat itu secara langsung mengkritik lemahnya penanaman nilai-nilai perjuangan bangsa dalam kurikulum. Sebagai respons atas kritik tersebut, Kurikulum 1984 memperkenalkan mata pelajaran baru bernama Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) untuk menguatkan kembali semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan siswa (Shinta, 2021).

Dan dari keseluruhan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 1975 merupakan pembaharuan besar dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini mengusung pendekatan yang berorientasi pada tujuan, sistem, integrasi, dan ekosistem untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengefisienkan proses belajar-mengajar, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang tengah membangun.

Adapun kelebihan dari Kurikulum 1975, antara lain : berorientasi pada tujuan pembelajaran yang jelas, mengarah pada pembentukan perilaku siswa, relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan psikologis yang memperhatikan perkembangan peserta didik, menekankan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, bersifat fleksibel karena mempertimbangkan kondisi daerah dan keterbatasan fasilitas, serta menjunjung prinsip keberlanjutan antar jenjang pendidikan.

Dan kurikulum ini juga memiliki sejumlah kelemahan, seperti ketidaksesuaian materi dengan kemampuan siswa, kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, isi kurikulum yang terlalu padat, beban administratif yang tinggi bagi guru, pendekatan yang terlalu sentralistik sehingga kurang memberi ruang pada potensi daerah, dominasi guru dalam pembelajaran yang menyebabkan pendekatan ceramah masih mendominasi, serta minimnya pengembangan kreativitas siswa karena pembelajaran terlalu berpusat pada guru.

5. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 lahir sebagai bentuk penyempurnaan dari Kurikulum 1975 yang dinilai belum berhasil mewujudkan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kurikulum sebelumnya dipandang terlalu administratif, padat materi, serta membebani guru dan peserta didik. Sebagai langkah reformasi pendidikan, Kurikulum 1984 secara resmi diberlakukan melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0461/U/1983 dan mulai diterapkan secara bertahap pada tahun ajaran 1984/1985.

Pergantian Kurikulum 1975 didorong oleh beberapa alasan mendasar yang berkaitan langsung dengan kualitas dan relevansi pendidikan. Salah satunya adalah dominasi materi teoritis yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja nyata. Selain itu, kepadatan materi di semua jenjang

menyebabkan waktu untuk pemahaman menjadi terbatas. Di lapangan, tidak semua guru mampu memahami dan menerapkan sistem PPSI secara merata. Ditambah lagi, adanya dorongan dari GBHN 1983 yang menekankan pembangunan manusia seutuhnya hal yang belum tercermin dalam kurikulum sebelumnya. Kritik juga datang dari kalangan guru dan praktisi pendidikan terhadap beban administrasi yang tinggi serta minimnya ruang untuk kreativitas dalam proses pembelajaran (Alhamduddin, 2016).

Kurikulum 1984 membawa semangat baru dalam pendidikan melalui pendekatan yang humanistik dan interaktif. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan struktur serta strategi pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arah pembangunan nasional. Kurikulum ini menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai ciri utamanya, Kurikulum 1984 mengusung pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang menjadikan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, siswa diharapkan tumbuh menjadi individu yang mandiri, kreatif, kolaboratif, serta bertanggung jawab. Adapun Salah satu ciri khas dari Kurikulum 1984 adalah berorientasi pada tujuan instruksional, di mana setiap topik atau mata pelajaran dimulai dengan rumusan tujuan yang jelas dan fungsional. Konsep CBSA diterapkan melalui kegiatan pembelajaran aktif, seperti pengamatan, diskusi, eksperimen, dan penyimpulan, dengan peran guru yang bergeser menjadi fasilitator.

Materi disusun dengan pendekatan spiral, yaitu disusun dari konsep yang sederhana menuju yang lebih kompleks sesuai tingkat kelas. Proses pembelajaran juga mengikuti pendekatan konkret ke abstrak, dimulai dari pengalaman nyata sebelum masuk ke ranah teori agar siswa lebih mudah memahami konsep. Selain itu, Kurikulum 1984 menekankan keterampilan proses, yaitu mengutamakan pemahaman konsep melalui alat bantu atau peraga sebelum masuk ke tahap latihan soal. Yang mana di dalam struktur pendidikan menengah, Kurikulum 1984 membagi program SMA ke dalam dua jalur utama, yaitu Program A dan Program B. Program A bersifat akademik dan terdiri dari empat jurusan: A1 (Fisika), A2 (Biologi), A3 (Ekonomi), dan A4 (Bahasa dan Budaya). Sementara itu, Program B yang berorientasi kejuruan belum dapat diterapkan secara merata karena keterbatasan sarana dan infrastruktur sekolah yang belum memadai.

Kurikulum ini juga memperluas cakupan mata pelajaran inti. Jika sebelumnya hanya terdiri dari 8 mata pelajaran utama, maka pada Kurikulum 1984 meningkat menjadi 16 mata pelajaran inti, termasuk Pendidikan Agama, Pancasila, PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Sejarah Dunia, dan Keterampilan. Yang di dalam hal ini memiliki kelebihan implementasi Kurikulum 1984 berhasil mengaktifkan siswa secara menyeluruh, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Pendekatan ini juga meningkatkan frekuensi diskusi dan interaksi di antara siswa, menjadikan pembelajaran lebih hidup. Selain itu, materi yang disajikan secara rinci mempermudah pemahaman bagi guru maupun siswa. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi berfokus pada pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Namun, pelaksanaan Kurikulum 1984 juga menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan CBSA kerap disalahartikan sebagai diskusi bebas tanpa arahan, yang menyebabkan kelas menjadi kurang terkontrol. Ketergantungan yang tinggi pada buku teks dan metode baku juga menghambat kreativitas guru dan siswa. Selain itu, kurikulum ini menyebabkan ketimpangan hasil belajar; siswa yang cerdas semakin menonjol, sementara siswa dengan kemampuan lemah semakin tertinggal. Guru belum sepenuhnya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, dan kepadatan materi masih menjadi persoalan besar jika dibandingkan dengan waktu belajar yang tersedia (Cahyani, 2024).

Kurikulum 1984 juga menunjukkan perhatian terhadap pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Pada masa ini, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) diperkenalkan sebagai lembaga formal bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ada pula upaya integrasi siswa tuna netra dan anak berkebutuhan lainnya ke dalam sekolah umum melalui penyesuaian metode

pembelajaran. SLB Pembina dijadikan sebagai model rujukan nasional dalam pendidikan inklusif, yang menjadi tonggak awal arah pendidikan yang lebih merata dan adil (Syahfitri & Firdaus, 2024).

6. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 disusun sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Hamdan, 2014). Kurikulum ini mengombinasikan unsur-unsur dari Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, yang berorientasi pada tujuan dan proses. Lahir untuk memperkuat stabilitas dan menyatukan sistem pendidikan secara nasional (Ghony, 2010). Hal ini menyebabkan pendekatan yang digunakan, lebih seragam dan cenderung mengabaikan variasi lokal, termasuk dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam. PAI mulai mendapatkan posisi yang lebih jelas dan stabil dalam struktur kurikulum formal serta ditandai dengan pengalokasian waktu belajar yang lebih tetap dan muatan materi yang lebih terstruktur. Konsep ini menjadikan PAI sebagai mata pelajaran terpisah yang berdiri sendiri dalam struktur kurikulum dan memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter siswa, atau dikenal sebagai *Separate Subject Curriculum*.

Materi PAI mulai disusun sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik, yang ditekankan pada aspek kognitif dan penguasaan materi ajar secara sistematis. Pada pendekatannya, penekanan diberikan pada pemahaman ajaran Islam secara teoritis, seperti Aqidah, akhlak, ibadah, dan sejarah Islam. Dengan demikian, PAI mulai diarahkan untuk membekali peserta didik dengan nilai-nilai keagamaan yang relevan dan aplikatif. dan pengelolaan waktu yang terencana agar peserta didik mampu memahami materi secara mendalam meskipun dalam waktu yang terbatas. Namun, dalam praktiknya di lapangan masih didominasi metode ceramah dan hafalan, sehingga aspek afektif dan psikomotorik cenderung terabaikan. Menurut Heryadi (2023), kurikulum 1994 unggul dalam pengorganisasian materi namun lemah dalam fleksibilitas implementasi di lapangan. Tantangan implementatif lainnya yaitu minimnya ruang praktik agama dalam kehidupan nyata siswa, tingginya beban waktu kurikulum yang menyebabkan waktu untuk pendalaman nilai-nilai agama menjadi terbatas, belum optimalnya guru dalam pendekatan tematik, dan pemahaman akan pendekatan terbaru.

Dengan berbagai transformasinya, kurikulum 1994 mencerminkan upaya penting dalam memformalkan posisi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Namun, tantangan pada tataran implementasi menandakan bahwa keberhasilan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh rancangan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, pendekatan pedagogis, dan adaptasi terhadap realitas sosial peserta didik. Hal ini menjadi perhatian penting untuk lebih menekankan pada pendekatan kontekstual, fleksibel, dan berbasis kompetensi untuk mendorong lahirnya kurikulum baru di era reformasi.

7. Kurikulum 2004

Perjalanan transformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam mencerminkan upaya berkelanjutannya dalam menjawab dinamika zaman yang terus berkembang. Setiap perubahan kurikulum tidak hanya menjadi kebijakan administratif, melainkan juga respons terhadap tantangan sosial, budaya, sistem pendidikan. Memasuki abad ke-21, kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal sebagai *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (KBK) mulai diarahkan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kontekstual, serta berorientasi pada kompensasi nyata. Kurikulum ini membawa pembaruan dalam paradigma pembelajaran dari kurikulum berbasis isi ke kurikulum berbasis kompetensi, yang tidak lagi fokus pada penguasaan materi, menjadi fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Ahmad, 2025).

Pada kurikulum 2004, menandai titik perubahan signifikan dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Tidak hanya menekankan penguasaan nilai-nilai keislaman, tetapi juga integrasi kompetensi moral, spiritual, sosial, serta kemampuan sikap toleransi antar agama. Secara proporsi, Pendidikan Agama Islam dalam struktur kurikulum nasional mengalami peningkatan alokasi dari 25% menjadi 30%. Dalam hal paradigma pembelajaran, kurikulum 2004 memakai pendekatan kompetensi berbasis tindakan atau *action based competence*. Kurikulum ini juga mengusung semangat pembelajaran kontekstual, berbasis proyek, dan kolaboratif, dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang aktif dan aplikatif. Dengan demikian, pembelajaran PAI diarahkan agar para siswa dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata, bukan sebatas teori saja.

Namun saat mengimplementasikannya, transformasi ini tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Pertama, terjadi karena ketidaksinkronan interpretasi dalam kurikulum antara guru dan pemangku, sehingga implementasi tidak seragam di berbagai daerah (Masyah, 2023). Kedua, keterbatasan kompetensi guru PAI, baik dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek maupun menyusun RPP inovatif menjadi penghambat utama. Ketiga, infrastruktur pembelajaran dan media digital interaktif belum merata, sehingga menghambat pelaksanaan pembelajaran kontekstual dan pemanfaatan teknologi pendidikan secara optimal (Husni, 2023).

Meskipun kurikulum 2004 memiliki keunggulan dalam memperkuat kompetensi efektif dan sosial, masih terdapat kesenjangan antara desain kurikulum dan praktik lapangan. Hal ini pun, menjadikan keberhasilan kurikulum 2004 bergantung pada kesiapan guru, dukungan sarana, dan konsistensi implementasi di satuan pendidikan (Husni, 2023). Dan kurikulum menjadi pembuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan model pembelajaran aktif dan reflektif dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia.

8. Kurikulum 2006

Kurikulum 2006 atau disebut *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang masih dianggap terlalu teoritis dan kurang fleksibel dalam penerapannya. KTSP diberlakukan secara nasional mulai tahun pelajaran 2006/2007 berdasarkan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Pelaksanaan KTSP mengacu pada peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan *standar isi* (SI) dan *standar kompetensi lulusan* (SKL). Kurikulum ini sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah yang artinya tidak ada intervensi dari dinas pendidikan atau departemen pendidikan nasional (Zulkifli Nuh, 2006). Prinsip pada pengembangan KTSP mengacu kompetensi siswa untuk hidup dan bermasyarakat menjadi dominasi model kurikulum rekonstruksi sosial. Pada kurikulum ini terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tingkat tertentu atau memperoleh ijazah. KTSP berfokus dengan rencana mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan KTSP tentu memiliki kekurangan, dinilai karena telah membuat celah besar dalam upaya pencapaian standar kelulusan dan menyimpan potensi destruktif yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa (Masykur, 2019).

Pada konteks PAI, KTSP menandai pergeseran strategi pembelajaran PAI dari KBK ke model desentralisasi, dimana sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik di daerah masing-masing. Tujuannya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan mendorong kreativitas guru. Secara administratif, dokumen KTSP dianggap lengkap karena adanya dukungan dari workshop nasional, MGMP, serta pedoman dari BSNP dan Kemenag (Legiman, 2014).

Meskipun begitu, implementasi KTSP tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti belum semua guru mampu menyusun RPP dan indikator kompetensi belum dikembangkan dengan baik, tidak meratanya kualitas kurikulum antar sekolah, serta minimnya pengawasan dan evaluasi pengembangan kurikulum PAI di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, pemberian kewenangan ke sekolah menyebabkan perbedaan mutu kompetensi siswa antar daerah dikarenakan tidak adanya standarisasi yang ketat (Raharjo et al., 2019). Ketidakseimbangan ini diperparah oleh keterbatasan kompetensi guru PAI dalam menerapkan pendekatan siswa, serta minimnya pemanfaatan media interaktif atau teknologi pendidikan. Namun demikian, KTSP menjadi fondasi penting dalam transformasi kurikulum, terutama dalam adaptasi lokal dan pembentukan kompetensi yang lebih holistik. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan serius terkait kualitas implementasi, kompetensi guru, dan keseragaman kurikulum di bidang PAI (Raharjo et al., 2019).

9. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 hadir sebagai bentuk evaluasi dari kurikulum 2006, dengan fokus utama pada pendidikan karakter, pendekatan saintifik, dan penguatan kompetensi abad 21 (Arifin, 2010). Pengertian kurikulum 2013 mengarahkan proses pembelajaran pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik. Mulyasa (Ikhsan & Hadi, 2018) mengidentifikasi tiga aspek utama dalam pengembangan kurikulum 2013. Pertama, penetapan kompetensi yang ingin dicapai yaitu merupakan pernyataan tujuan untuk menggambarkan hasil belajar dalam hal pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap peserta didik. Kedua, strategi pencapaian kompetensi, berfungsi sebagai upaya untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan. Ketiga, evaluasi sebagai bentuk kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi setiap peserta didik.

Kurikulum 2013 menghadirkan perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran melalui penerapan tiga model utama, yaitu model pembelajaran berbasis proyek (*Project-based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), dan pembelajaran penemuan (*discovery learning*). Ketiga model ini mendorong peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam memahami serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Selain itu, Kurikulum 2013 juga memperkenalkan berbagai teknik penilaian formatif baru, seperti penggunaan jurnal dan observasi guru, penilaian diri, penilaian berbasis proyek, dan portofolio sebagai alternatif evaluasi proses belajar. Perubahan ini menuntut guru untuk mampu menerapkan pembelajaran tematik terintegrasi dengan pendekatan ilmiah yang menekankan proses, pembentukan karakter, serta pembiasaan berpikir kritis dalam setiap mata pelajaran. Namun demikian, dalam praktiknya, meskipun teknik penilaian formatif telah diperkenalkan, implementasinya masih sangat bergantung pada bentuk evaluasi tradisional seperti tes dan ujian tertulis, yang menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan Kurikulum 2013 secara menyeluruh (Anwas, 2013).

Dalam konteks PAI, hal ini diartikan materi disampaikan dan dijelajahi oleh siswa langsung melalui pengalaman nyata. Seperti pada kajian nilai-nilai akhlak dari kisah-kisah nabi, praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari, serta refleksi atas nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini bertujuan menumbuhkan pemahaman lebih mendalam dan internalisasi nilai keagamaan. Namun, realitas menunjukkan tantangan nyata, beberapa mengungkapkan beberapa guru PAI kesulitan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran saintifik karena terbatasnya pemahaman tentang metodologi saintifik serta minimnya pelatihan teknis mengajar (Hamdani, 2022). Selain itu masih banyak guru belum mampu dalam menyusun RPP dan bahan ajar yang interaktif masih jarang ditemukan (Marunduri & Wirdati, 2021). Kendala infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan sarana teknologi masih sangat kurang, sehingga metode saintifik belum bisa diaplikasikan secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun kurikulum 2013 membawa paradigma pembelajaran PAI ke arah yang lebih modern dengan saintifik. Dari pembelajaran berbasis hafalan ke metode pembelajaran berbasis pemahaman dan pengalaman nilai. Memposisikan guru bukan hanya sebagai penyampaian ajaran, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar dapat mengamalkan ajaran Islam secara kontekstual dan inklusif. Namun, implementasinya sangat bergantung pada kesiapan guru, fasilitas infrastruktur serta keberadaan bahan ajar yang ada adaptif dan kreatif. Dengan ini, PAI diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.

10. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka Hadir sebagai bentuk respons terhadap ketidakfleksibelan kurikulum 2013, serta kebutuhan mendesak akan pendidikan yang relevan, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini, menekankan pada penggunaan teknologi, yang sejalan dengan era digital. Oleh karena itu, peserta didik dan pendidik diharapkan harus mampu dalam penggunaan teknologi, dengan tujuan agar pembelajaran lebih bervariasi dan membangkitkan semangat belajar siswa (Zakso, 2023). Kurikulum ini juga menekankan pada kebebasan belajar mandiri bagi guru dan siswa di tiap kesempatan, menjadi lebih santai dan berinteraksi lebih bebas, juga membangkitkan keberanian, kemandirian, sosial, kecerdasan, perilaku sopan, dan berkompeten.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, kurikulum Merdeka mempertegas pergeseran dari kurikulum yang terstandar nasional menuju pendekatan diferensiasi, dan berbasis proyek. PAI dalam kurikulum merdeka diposisikan sebagai sarana pembentukan karakter religius, toleran, dan cinta damai. Muatan ajar dalam kurikulum Merdeka dirancang secara fleksibel oleh satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP), dan guru diberikan ruang luas untuk mengembangkan modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) berbasis nilai-nilai Islam.

PAI dalam kurikulum Merdeka juga membawa pembaruan penting dengan kebebasan operasional sekolah, guru, dan peserta didik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Perubahan paling mencolok terlihat dari metode Project-based learning yang digabungkan dengan nilai profil pelajar Pancasila, serta penggunaan modul ajar dan asesmen non-kognitif sebagai landasan personalisasi pembelajaran (Sari et al., 2024). Meskipun secara konsep sangat progresif, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Banyak guru PAI belum memahami penuh esensi kebebasan dalam belajar sehingga beberapa masih bergantung pada metode tradisional berupa ceramah dan hafalan (Aminah & Sya'bani, 2023), kurangnya pemahaman dalam penyusunan modul ajar, minimnya pelatihan terstruktur dan intensif, dan dari sisi sarana, juga masih beberapa sekolah mengalami kesulitan menyediakan pembelajaran, infrastruktur, dan modul ajar yang relevan, terutama dalam mengakomodasi perbedaan kebutuhan siswa.

Namun demikian, kurikulum Merdeka menjadi peluang bagi Pendidikan Agama Islam untuk tidak sekedar diajarkan, tetapi dihidupkan dalam kehidupan peserta didik. Tidak hanya membentuk pelajar yang taat secara ritual, tetapi juga toleran, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman, mulai dari arus digitalisasi hingga perubahan sosial global. Dengan kurikulum Merdeka, PAI kembali pada esensinya yaitu membangun manusia berkarakter, beriman, dan berkontribusi nyata dalam masyarakat yang beragama.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah mengalami transformasi yang dinamis dan berkelanjutan dari masa ke masa, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Transformasi pada kurikulum menunjukkan arah yang semakin inklusif, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Namun demikian, dalam

implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, dan kesenjangan antar wilayah. Yang menyebabkan tujuan utama penguatan karakter religius dan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum PAI belum sepenuhnya optimal di berbagai satuan pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan untuk: (1) Meningkatkan kompetensi guru PAI melalui pelatihan berkelanjutan secara praktis dan kontekstual, dengan tujuan mampu mengimplementasikan kurikulum secara kreatif dan relevan dengan karakter peserta didik; (2) Evaluasi dan refleksi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum, untuk mengidentifikasi kendala implementasi dan mengembangkan model pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dan tantangan zaman; (3) memperkuat infrastruktur pendidikan di wilayah yang tertinggal sebagai bentuk terciptanya keadilan implementatif dalam pelaksanaan kurikulum yang fleksibel dan berbasis proyek; dan (4) Dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, baik satuan pendidikan dan masyarakat, guna membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, moderat, dan transformatif khususnya pada pembelajaran PAI.

REFERENSI

- Ahmad Dhomiri, Junedi Junedi, & Mukh Nursikin. (2023). Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 118–128. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i1.972>
- Ahmad, M. I. (2025). Transformasi peran guru dalam implementasi dan evaluasi kurikulum PAI. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 331–339. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.1117>
- Alhamduddin. (2016). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 43. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika Perubahan Kurikulum Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 PAUD](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika%20Perubahan%20Kurikulum%20Kebijakan%20Perubahan%20Kurikulum%202013%20PAUD)
- Aminah, I. A. N., & Sya'bani, M. A. Y. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 293. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i2.2804>
- Ananda, A. P., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102–108. <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1192>
- Anwas, O. M. (2013). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Teknodik*, 17(1), 493–504.
- Arifin, M. (2010). *Konsep Kurikulum 2013*. XVIII(3), 1–23.
- Arisanti, D. A. K. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 243–250. <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1386>
- Astrida. (2007). Konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Implementasinya. <https://sumsel.kemendikbud.go.id/Files/Sumssel/File/Dokumen/Ktsp>, 1–11.
- Cahyani, R. (2024). *PSPB : Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruh Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia PSPB : The 1984 History Curriculum And Its Influence On The Thinking Of Indonesia ' S Young Generation*. 20(1), 60–71.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kurikulum 2004 Kerangka Dasar*. 135. https://tatagyes.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/10/kbk_pembiasaan-kurikulum-2004.pdf
- Dhaifi, A. (2018). Perkembangan Kurikulum Pai Di Indonesia. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 76–88. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.47>
- Djunaidi Ghony, F. A.-M. (2010). *Politik Pengambilan Keputusan Tentang Kurikulum* (U. Malang (ed.)). 2010. https://digilib.unuja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10047
- Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd. Meni Handayani, SS, M.Si. Dr. Parwanto, SE, MM Iwan Mustari, S. P. (2019). Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_M_ELESTARI
- Fadhilah Putri, Z., & Maula, N. (2024). Studi Literatur: Transformasi Kurikulum Indonesia 1947 Sampai Kurikulum Merdeka Dilihat dari Perspektif Model Kurikulum: Literature Study on 1947 Curriculum Until Merdeka Curriculum. *Jurnal Teknodik*, 28(1), 77–93. <https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknodik/article/view/1160>

- Febriyenti, D., Putri, N., Asmendri, A., & Sari, M. (2023). Perkembangan Kurikulum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 195–214. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i2.932>
- Hamdan. (2014). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teori dan Praktek. In *Aswaja Pressindo*.
- Hamdani, H. (2022). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penerapan Kurikulum 2013 (K-13) Di SMP Negeri 1 Kepahiang. In ... *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama ...* (Vol. 2). <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau/article/view/634%0Ahttp://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau/article/download/634/596>
- Heryadi, J. (2023). *AL – KAFF: Jurnal Sosial Humaniora Vol.1 No.5 Bulan November Tahun 2023 / 440*. 1(5), 440–457.
- Husni, N. (2023). Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al-Rabwah*, 17(01), 52–60. <https://doi.org/10.55799/jalr.v17i01.252>
- Husnul Buairi, Mila, M. (2025). Transformasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia : Studi Kebijakan , *Pendidikan Berkarakter*, 8(1), 70–77.
- Ikhsan, K. N., & Hadi, S. (2018). Implementasi dan Pengembangan Kurikulum 2013. In *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* (Vol. 6, Issue 1, p. 193). <https://doi.org/10.25157/je.v6i1.1682>
- Indonesia, D. P. dan K. R. (1976). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-Garis Besar Program Pengajaran*. 8, 6. [https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9245/1/Kurikulum SD 1975 GBPP Buku II C Bidang Studi IPS 1976.pdf](https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9245/1/Kurikulum%20SD%201975%20GBPP%20Buku%20II%20C%20Bidang%20Studi%20IPS%201976.pdf)
- Izmi, A. (2017). *Politik Kurikulum Di Indonesia*. 104.
- Kebudayaan, kementerian pendidikan dan. (2012). *The 2013 Curriculum Document*. 18. <https://desyandri.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/dokumen-kurikulum-2013.pdf>
- LEGIMAN. (2014). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bidang Studi Pai (Implementasi Dan Problematikanya Pada Sma Dan Ma Di Kota Langsa). *Jurnal An-Nur*, 6(1), 105–126. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16137/>
- Marunduri, A. W., & Wirdati, W. (2021). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Kurikulum 2013. *An-Nuha*, 1(4), 500–509. <https://doi.org/10.24036/annuha.v1i4.129>
- Masyah, A. (2023). *Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Thesis, 1–23.
- Masykur, R. (2019). *Telaah Kurikulum Pengembangan Kurikulum*. In CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nur Ika Trisnawati, S., Praptiningsih, Mp., ProfDrHZulkifli, Mp., DrTuti Khairani Harahap, Mp., Anja Natalia Putri, Ms., Nuri Ramadhan, Sp., & Siti Nur Hidayati, Mp. (2020). Kurikulum Prototipe Sebagai Opsi Pendidikan Di Indonesia. *Tahta Media Group*, 1–44.
- Nurfadillah. (2024). Pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa bidang studi pendidikan agama islam kelas vi di sd inpres 12/79 tappale kabupaten bone. *Synthesisjournal.Com*, 1(2), 110.
- Presiden Republik Indonesia. (1947). Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 1947 Tentang Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan. *Presiden Republik Indonesia*, 1, 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25487/uu-no-32-tahun-1947>
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). Komparasi Kurikulum 1964 Dan 1968 Serta Kajian Materi Geografi Pada Jenjang Smp. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(1), 278–290. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v9i1.450>
- Sari, D., Amin, A., & Dewi, D. E. C. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, 4(2), 1133–1143. <https://doi.org/10.51574/jrip.v4i2.1578>
- Sholihah, M., Saddhono, K., & Anindyarini, A. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Dalam Dan Luar Negeri (Studi Kasus Pembelajaran Teks Biografi Di Sma Negeri 1 Surakarta Dan Sekolah Indonesia Singapura). *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(1), 184. <https://doi.org/10.20961/basastra.v6i1.37713>
- Soedijarto, Thamrin, Karyadi, B., Siskandar, & Sumiyati. (2010). *Sejarah Pusat Kurikulum*. 153 hlm. http://staffnew.uny.ac.id/upload/198503272014042001/pendidikan/Sejarah_kurikulum.pdf
- Syahfitri, F., & Firdaus, D. S. (2024). Analisis Perkembangan Kurikulum Pembelajaran PPKn SD: Implementasi Kurikulum 1984-Kurikulum Merdeka. *Journal of Educational Technology*, 4(1), 1–6.
- Wahyudin, D., Subkhan, E., Malik, A., Hakim, M. A., Sudiapermana, E., LeliAlhapip, M., Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, L. S., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). Kajian Akademik Kurikulum Merdeka. *Kemendikbud*, 1–143. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Pendidikan*, 30(1–2), 249–253. <https://doi.org/10.1023/A:1013199923212>
- Wibawanti, A. (2018). Implementasi Kurikulum Humanis Dalam Proses Pembelajaran Di Sd Kanisius Mangunan.

- Basic Education*, 7(36), 3-528-3.537.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/pgsd/article/view/13993>
- Wurdiana Shinta, L. E. (2021). Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *Jurnal Edudikara*, 2(2), 3–5.
- Zaelani, Junaidi, Muhammad, & Muhsinin. (2023). Transformasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Perkembangan Terkini dan Tantangan di Era Digital). *Schemata*, 12(1), 67–80. <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>
- Zakso, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 916. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.65142>
- Zubaedi, M. A. (2017). Desain Pendidikan Karakter, konsepsi dan aplikasinya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Zulkifli Nuh, O. M. (2006). Jejak monopoli kurikulum oleh negara; sebuah analisis kurikulum PAI 2006 dengan 2013 Kelas VII. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 187–206. <https://doi.org/10.24014/jiik.v4i2.4782>